



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 9 /900/2022

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2013 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan Objek Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang bumi dan bangunan perdesaan/ perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu kiranya menetapkan Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran Dan Nilai Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Di Bayar Sendri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

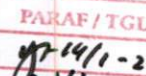
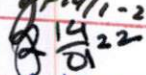
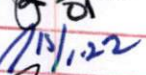
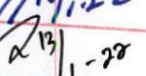
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan tanggal jatuh tempo, tempat pembayaran dan nilai minimal pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pariaman Tahun 2022
- KEDUA** : Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah pada tanggal 30 September 2022
- KETIGA** : Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum kesatu yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi adalah Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Pariaman.
- KEEMPAT** : Nilai minimal sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal, 17 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/1-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 14/22
KADIS HUKUM & HAM	 11/22
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 13/1-22